

## KAJIAN SEJARAH KONTROVERSI INTEGRASI TIMOR TIMUR : APAKAH SUDAH SESUAI FAKTA ATAU HANYA REKAYASA BELAKA

Hanifah Nur Liani<sup>1</sup>, Ilham An’Nur Pajar<sup>2</sup>, Ahmad Hisyam Syauqi<sup>3</sup>, Rikza Fauzan<sup>4</sup>

[2288210035@untirta.ac.id](mailto:2288210035@untirta.ac.id) , [rikza.fauzan@untirta.ac.id](mailto:rikza.fauzan@untirta.ac.id)

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

### ABSTRAK

Sejarah Timor Timur merupakan sejarah konflik. Timor Timur merupakan sebuah negara baru yang memisahkan diri dari Indonesia melalui jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Hal tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Bahkan pemerintah Indonesia juga sangat terkejut akan adanya peristiwa tersebut karena pemerintah Indonesia merasa sudah sangat berjasa dan mengeluarkan begitu banyak biaya untuk membangun wilayah yang kelak digadang-gadang sebagai provinsi termuda di Indonesia tersebut agar dapat mengembangkan dan memajukan sumber daya yang ada di wilayah tersebut semaksimal mungkin. Hasil tersebut karena disebabkan oleh pertikaian yang terjadi antara pihak Fretilin untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan pemerintah Indonesia yang menganggap Fretilin sebagai dalang ataupun tokoh separatis yang harus segera dipadamkan oleh pendekatan militer saat itu sehingga dari adanya peristiwa tersebut menimbulkan banyaknya pelanggaran HAM terhadap masyarakat Timor Timur dan menjadi isu yang sangat serius dalam perpolitikan internasional. Artikel ini membahas mengenai sejarah kontroversi dari adanya peristiwa integrasi Timor Timur dan penulis juga berusaha untuk membandingkan serta mengungkapkan beberapa kontroversi di dalamnya dengan didukung dari historiografi lain dan melakukan kajian pustaka terhadap sumber-sumber yang menjelaskan mengenai peristiwa integrasi Timor Timur.

**Kata Kunci :** Konflik, Pelanggaran HAM, Integrasi Timor Timur

### ABSTRACT

The history of East Timor is a history of conflict. East Timor is a new country that separated from Indonesia through an opinion poll held on August 30 1999. This then gave rise to its own pros and cons. Even the Indonesian government was very surprised by this incident because the Indonesian government felt that it had done a great service and spent a lot of money to develop the region which was later predicted to be the youngest province in Indonesia so that it could develop and advance the existing resources in the region as much as possible. . This result was caused by the conflict that occurred between Fretilin to fight for its independence and the Indonesian government which considered Fretilin as masterminds or separatist figures who had to be immediately suppressed by the military approach at that time so that this incident gave rise to many human rights violations against the people of East Timor and became an issue. who is very serious in international politics. This article discusses the history of the controversy over the East Timor integration event and the author also tries to reveal some of the controversies in it with support from other historiography and conducting a literature review of sources that explain the East Timor integration event.

*Keywords* : Conflict, Human Rights Violations, East Timor Integration.

## PENDAHULUAN

Pulau Timor terletak pada koordinat 123°25' s/d 127°19' Bujur Timur dan 8°17' s/d 10°22' Lintang Selatan, diagonal dari barat daya ke timur laut. Bentuk geografis pulau ini dianggap oleh penduduk setempat menyerupai buaya dengan kepala menghadap ke Samudera Hindia, sedangkan ekornya mengapung di pertemuan Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Timor. Proses geologi yang terjadi di masa lalu dan membentuk pulau tersebut merupakan rangkaian perkembangan luar biasa yang tercermin saat ini dalam bentuk topografi yang sangat kompleks. Bagian timur pulau terdiri dari barisan pegunungan yang membentang di sepanjang pulau, terdiri dari perbukitan karang dan puncak berbatu yang dipisahkan oleh lembah dan jurang terjal. Formasi batuan ini disebut fatu dan tingginya bisa mencapai lebih dari 2.000 meter, dengan puncak tertingginya adalah Gunung Tata Mai Lau (2.999 meter) di distrik Ainaro. Di kabupaten yang sama juga terdapat Gunung Sabiria (2.495 meter) dan Gunung Usululi (2.620 meter), sedangkan di distrik Ermera terdapat Gunung Hatupai (2.293 meter) dan Gunung Lakulo (2.050 meter), serta di distrik Manufani terdapat Mont Cablaque. (2495 meter), lebih jauh ke timur, adalah Gunung Matebean (1373 meter).

Perjalanan sejarah Timor Timur ini melalui jalan yang cukup Panjang. Bangsa Portugis mulai memonopoli system perekonomian yang ada di wilayah Timor Timur dengan meruntuhkan segala kerajaannya. Adanya penghancuran pusat kerajaan dan diadakannya system monopoli oleh bangsa Portugis ini berdasar atas kekhawatiran bangsa portugis kepada Belanda yang hampir seluruhnya menguasai wilayah Nusantara termasuk wilayah Timor Timur. Proses kolonialisasi yang dilakukan oleh bangsa Portugis di wilayah Timor Timur berlangsung cukup lama. Ketika bangsa Indonesia sudah mulai memerdekakan diri dari Belanda dan Jepang, Timor Timur masih belum merdeka atas dirinya sendiri dan masih berada dibawah kolonialisme Portugis.

Proses integrasi wilayah Timor Timur ke Indonesia telah disahkan secara resmi dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 yang membahas mengenai penyatuannya wilayah Timor Timur ke Indonesia dan Pembentukan Daerah Provinsi Tingkat 1 Timor timur. Selama berintegrasi dibawah naungan bangsa Indonesia, Timor Timur diadakan pembangunan yang cukup signifikan dan dikelola secara khusus oleh pemerintah Indonesia. Terutama dalam hal mobilisasi dimana setiap orang yang keluar dan masuk ke wilayah Timor Timur harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat oleh pemerintah Indonesia hal ini bertujuan untuk menimbulkan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah Timor Timur.

Namun proses integrasi tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik tetapi terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya muncul berbagai partai politik di Timor Timur yang mencanangkan untuk menolak adanya Gerakan

Integrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Partai politik tersebut menganggap bahwa Timor Timur bisa berdiri di kakinya sendiri tanpa harus berada dibawah naungan bangsa Indonesia. Sehingga dari adanya pergolakan tersebut menimbulkan kontroversi terhadap proses integrasi Timor Timur yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan melakukan analisis terhadap kasus tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh buku sejarah Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk keperluan proses belajar mengajar dan penulis juga membandingkan dengan historiografi lain yang membahas mengenai kasus integrasi Timor Timur yang ternyata banyak terdapat kebohongan-kebohongan yang dituliskan oleh pemerintah Indonesia untuk keperluan negaranya tanpa masyarakat ketahui fakta dari peristiwa tersebut. Sehingga penulis memberi judul artikel ini yaitu *"Kajian Sejarah Kontroversi : Proses Integrasi Timor Timur Apakah Sudah Sesuai Fakta Atau Hanya Kebohongan Belaka"*.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan menguraikan masalah secara deskriptif dan rinci, berdasarkan fakta-fakta yang objektif. Penelitian perpustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti buku-buku, penelusuran literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian, digunakan untuk mengumpulkan data untuk artikel ini. Dalam metode penelitian, informasi dikumpulkan dari berbagai literatur terkait dengan proses integrasi yang menyebabkan Timor Timur berpisah dari Indonesia. Kemudian, bahan pustaka atau literatur tersebut dianalisis dan dikritisi untuk memperoleh bahan faktual dan informatif yang relevan. Dalam penelitian ini, bahan kepustakaan digunakan sebagai alat analisis untuk memperkaya sudut pandang agar hasil penelitian menjadi lebih objektif dan ilmiah. Pembahasan mengenai proses integrasi yang menyebabkan Timor Timur berpisah dari Indonesia dapat dilakukan atau dikaji dengan metode deskriptif kualitatif, karena peneliti dapat memperoleh banyak informasi dari sumber tersebut dan dapat melakukan tinjauan kritis untuk mengecek keabsahan informasi tersebut. Para ilmuwan kemudian menggunakan data yang diperoleh sebagai dasar untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Metode penelitian ini juga memungkinkan adanya gambaran peristiwa secara rinci dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Naskah Buku Teks Sejarah SMA Kurikulum 2013 Yang Membahas Mengenai Integrasi Timor Timur

Integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional pada saat itu, khususnya Perang Dingin di mana terjadi persaingan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet) di kawasan Asia Tenggara. Kejatuhan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 memicu kekhawatiran terhadap

teori domino, yang menyatakan bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan pemerintah komunis akan merembet ke wilayah lain.

Kemenangan komunis di Indocina (Vietnam) juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan elit Indonesia, terutama di lingkungan militer. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis (Timor-Timur) yang berbatasan langsung dengan Indonesia, terjadi krisis politik akibat perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spínola, yang berupaya mengembalikan hak-hak sipil dan hak demokrasi masyarakatnya.

Di Timor-Timur, muncul tiga partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal, yaitu Uniao Democratica Timorese (UDT), Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (Fretilin), dan Associacão Popular Democratica Timorese (Apodeti). Selain itu, terdapat dua partai kecil, yaitu Kota dan Trabalhista. Ketiga partai besar tersebut saling bersaing, bahkan terjadi konflik berupa perang saudara.

Pada tanggal 31 Agustus 1974, ketua umum Apodeti, Arnaldo dos Reis Araujo, menyatakan keinginan partainya untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangannya adalah adanya persamaan historis, etnis, dan geografis antara rakyat di kedua wilayah tersebut. Keterlibatan Indonesia di Timor-Timur terjadi setelah permintaan dari pendukung "Proklamasi Balibo" yang terdiri dari UDT bersama Apodeti, Kota, dan Trabalhista. Pada tanggal 30 November 1975, keempat partai tersebut di Kota Balibo menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timor-Timur mengeluarkan petisi yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menerima bersatunya rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Republik Indonesia. Atas permintaan bergabung dari rakyat Timor Timur, pemerintah Indonesia meluncurkan "Operasi Seroja" pada Desember 1975, yang didukung secara diam-diam oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berkuasa di Timor Timur. Pada masa itu, Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet sedang berlangsung.

## **B. Historiografi Lain Yang Membahas Mengenai Integrasi Timor Diambil dari Buku Sejarah Konflik**

Meskipun tidak pernah menjadi gagasan yang dominan, keyakinan bahwa Timor Portugis merupakan bagian dari Indonesia karena alasan sejarah, geografis, dan etnis tetap menjadi topik yang relevan dalam diskusi politik di Indonesia, dan dapat diangkat kembali kapan pun dibutuhkan. Ancaman penyatuan dan integrasi Timor Portugis dengan Indonesia selalu menggantung di udara, mempengaruhi hubungan antara kedua wilayah tersebut. Gubernur-gubernur Timor Portugis pasca perang selalu mencurigai niat Indonesia, dan selalu berupaya untuk membatasi interaksi antara kedua wilayah tersebut. Meskipun tingkat keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan tahun 1959 masih menjadi perdebatan, tindakan represif yang terjadi

setelahnya dan analisis pemerintah Timor Portugis mengenai sumber pemberontakan tersebut menunjukkan bahwa pihak Portugis sangat yakin bahwa Indonesia memiliki agenda terhadap wilayah tersebut. Indonesia tidak mengabaikan kekhawatiran tersebut. Pada bulan Juli 1961, sebagai contoh, dalam sebuah pidato yang menekankan pentingnya dukungan internasional terhadap kemerdekaan Angola, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Dr Soebandrio, memberikan peringatan keras kepada Portugal mengenai hubungan Indonesia dengan Timor Portugis. Pada tahun 1962, sebuah laporan dari Komite Dekolonisasi PBB mencatat bahwa sebuah "Biro Pembebasan Republik Timor" telah didirikan di Jakarta. Pada bulan Mei-Juni 1963, biro tersebut mengumumkan pembentukan pemerintahan dengan 12 menteri di Batugade. Pada bulan September 1963, Menteri Penerangan Indonesia, Roeslan Abdulgani, menyatakan: meskipun kami bukan negara yang bersifat ekspansionis, kami tidak akan membiarkan bangsa dengan sejarah nenek moyang yang sama dengan kami ditindas dan dipenjara hanya karena mereka ingin bersatu dengan tanah air nenek moyang mereka.

Banyak perdebatan yang mengulas apakah Fretilin adalah partai komunis, namun sejauh mana Fretilin dipengaruhi oleh komunisme pada tahun 1974-1975, dan apakah hal ini menjadi alasan utama dari aksi bersenjata UDT dan intervensi Indonesia masih diperdebatkan. Komisi mendengar banyak kesaksian terkait isu ini dalam audiensi publik nasional mengenai Konflik Internal tahun 1974-76. Jelas bahwa beberapa anggota Fretilin memiliki latar belakang komunis, namun tidak benar untuk mengambil kesimpulan bahwa partai tersebut secara keseluruhan adalah partai komunis pada tahun 1974-75. Rangkuman yang lebih tepat adalah bahwa mayoritas pimpinan Fretilin cenderung ke arah tengah-kiri, meskipun partai ini mencakup beragam pandangan mulai dari ekstrim-kiri hingga unsur-unsur yang lebih konservatif. upun partai ini mencakup serangkaian opini yang bervariasi dari ekstrim-kiri sampai unsur-unsur yang lebih konservatif.

### **C. Mengenai Deklarasi Balibo**

Pada tanggal 15 Oktober, Tim Susi dan batalyon Brigade Infantri Kedua ABRI melancarkan serangan ke Balibó, dimana lima jurnalis internasional tewas. Para jurnalis tersebut sedang meliput berita mengenai operasi militer Indonesia di Timor Portugis. Tiga jurnalis Australia dan dua jurnalis Inggris yang bekerja untuk Televisi Australia tewas dalam keadaan yang dirahasiakan oleh pejabat militer Indonesia saat itu. Salah satu kemungkinan eksekusi para jurnalis tersebut adalah karena mereka menyaksikan skala besar operasi Indonesia di sekitar Balibo, yang jauh lebih besar dari penyusupan sebelumnya.

Pada tanggal 16 Oktober, ketika militer Indonesia merebut Balibo dan Maliana, garis depan Fretilin bergerak ke Atabae dan Bobonaro. Komisi memiliki rekaman film dari operasi militer Indonesia ini, yang menunjukkan penggunaan kapal perang untuk

mengebom posisi Fretilin dan pendaratan pesawat di Maliana, yang jelas merupakan penyerangan besar. Berbeda dengan serangan di bulan Agustus atas Atsabé yang melibatkan pasukan Partisan untuk mendukung unit Pasukan Khusus, serangan atas Balibó melibatkan sedikit orang Timor. Meskipun begitu, Indonesia berupaya menyalahkan sekutu UDT/Apodeti mereka atas kematian para jurnalis tersebut. Secara umum, pihak berwenang Indonesia secara berulang kali menyangkal keterlibatan pasukan mereka secara militer di Timor Portugis pada bulan September-November. Sebaliknya, mereka menyatakan bahwa bentrokan apapun yang terjadi disebabkan oleh para "Partisan"Timor-Leste yang mencoba menangkis serangan ke wilayah Indonesia. Di bagian paling bawah deklarasi tersebut terdapat kata-kata "Dilakukan di Balibo" dan tanda tangan dari perwakilan keempat partai. Kontroversi selama bertahun-tahun mengelilingi pembuatan apa yang disebut Deklarasi Balibo. Komisi mendengarkan kesaksian dari para pemimpin politik Timor-Leste yang hadir saat penandatanganan, yang mengatakan bahwa deklarasi tersebut disusun di Jakarta dan ditandatangani di sebuah hotel di Bali oleh para pemimpin partai, yang seperti yang disebutkan oleh salah satu penandatanganan, berada "di bawah pengawasan ketat", namun tetap berusaha berargumen selama berjam-jam untuk tidak menandatangani dokumen tersebut. Mereka bersaksi tentang tekanan yang diberikan kepada politisi Timor oleh anggota badan intelijen Bakin dalam penyusunan dan keputusan untuk memungut suara mengenai deklarasi tersebut. Deklarasi tersebut dibacakan dari pemancar radio berkekuatan tinggi di Balibo. Pada tanggal 28 November 1975, Pasukan Indonesia sudah menguasai sebagian besar daerah di Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menyelesaikan persiapan politiknya pada awal bulan Desember, dan membulatkan tekadnya untuk mengambil alih wilayah tersebut. Ini bukanlah berita baru bagi para penguasa Barat. Intelijen AS dan Australia telah memantau penguatan pasukan Indonesia, dan pemerintah mereka telah terlibat dalam dialog yang terus menerus dengan Indonesia selama periode operasi militer di bawah Operasi Flamboyan, terutama melalui Harry Tjan Silalahi dan Yusuf Wanandi dari CSIS, think-tank yang didirikan oleh Kepala Intelijen Jenderal Ali Moertopo. Setelah mendapat peringatan dari Pemerintah Australia pada tanggal 2 Desember, sebagian besar warga asing yang masih tinggal di Dili segera pergi. Satu-satunya wartawan asing yang tersisa di wilayah tersebut adalah warga Australia Roger East.

Para jurnalis Indonesia menyebarkan berita dan berkali-kali memberitakan kebohongan ini, yang memperkuat mitos bahwa Indonesia tidak melakukan invasi tetapi partai pendukung integrasi Timor yang kembali mengambil alih kekuasaan di wilayahnya dengan bantuan dari sejumlah kecil "sukarelawan"Indonesia. Sejarawan Indonesia Dr. Asvi Warman Adam, seorang Profesor Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan kepada Komisi bahwa mitos ini memiliki dampak jangka

panjang di Indonesia. Dalam menilai beberapa titik sejarah penting, dia percaya bahwa perlu ada peninjauan kembali di Indonesia terkait dengan periode ini. Dr. Adam mengatakan kepada Komisi bahwa istilah "sukarelawan" jelas tidak benar karena harus diakui bahwa mereka adalah tentara Indonesia. Mengenai skala penyerangan terhadap Dili, Dr. Adam mengatakan kepada Komisi bahwa serangan ini dapat "disejajarkan dengan serangan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta [pada tahun 1958], yang merupakan operasi militer terbesar dalam sejarah perang Indonesia".

### **Analisis Kontroversi dari Adanya Peristiwa Integrasi Timor Timur**

Peristiwa ini menjadi kontroversial di masyarakat setelah wilayah Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999. Persoalannya adalah bahwa masyarakat merasa kurang mendapatkan informasi yang akurat dan proporsional dari pemerintah mengenai Timor Timur. Selama dua dekade, pemerintah Orde Baru selalu menyatakan tiga hal krusial mengenai Timor Timur. Pertama, masyarakat Timor Timur diharapkan ingin bergabung dengan Indonesia. Kedua, situasi di Timor Timur dinyatakan aman dan terkendali. Dan ketiga, Fretelin di Timor Timur digambarkan sebagai partai kecil, komunis, dan oleh karena itu dianggap jahat.

Wacana yang digagas oleh pemerintah Orde Baru tersebut, dalam perkembangannya, mulai dipertanyakan keabsahannya. Dari laporan-laporan informal dan kesaksian langsung mengenai situasi di Timor Timur, terungkap bahwa daerah tersebut tetap mengalami masalah, kerusuhan, dan terjadi aksi-aksi klandestin secara berkelanjutan. Sementara itu, dari penelitian-penelitian yang relatif objektif mengenai proses integrasi Timor Timur ke Indonesia, terlihat adanya manipulasi dan ketidakadilan. Sebagai contoh, pada peristiwa "Deklarasi Balibo" tahun 1975 dimana penduduk Timor Timur menyatakan kemerdekaannya dan keinginan untuk bergabung dengan Indonesia, banyak yang melihatnya sebagai "Deklarasi Bali Bohong" karena deklarasi tersebut disinyalir direncanakan dan diatur oleh intelijen Indonesia di pulau Bali dan dianggap penuh dengan kebohongan. Begitu pula dengan upaya penyusupan sukarelawan untuk mendukung partai Apodeti di satu sisi, dan melawan Fretelin di sisi lain, ternyata bukanlah "sukarelawan sembarangan" melainkan pasukan elit TNI seperti dari Kopassanda, Kostrad, dan Marinir. Dalam perkembangan berikutnya, kegagalan TNI dalam mengatasi kekuatan Fretelin di Timor Timur dan tidak efektifnya pemerintah Indonesia dalam memenangkan hati rakyat Timor Timur menunjukkan bahwa isu Timor Timur akan menjadi blunder bagi Indonesia. Dan memang benar, saat jajak pendapat dilakukan di Timor Timur pada tahun 1999 – karena tekanan dari komunitas internasional – untuk menentukan apakah tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka, mayoritas penduduk Timor Timur memilih untuk merdeka.

## KESIMPULAN

Dari artikel yang telah penulis jelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Timor Timur merupakan Kawasan yang termasuk dalam gugus pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Wilayah timor timur memiliki letak geografis yaitu terbentang antara 123 derajat dan 127 derajat bujur timur dan diantara 8 derajat serta 22 derajat lintang selatan. Timor timur memiliki 2 pulau yang cukup besar antara lain yaitu pulau Atauro yang berada di sebelah Utara dan Dili dan Pulau Jaco yang berada di wilayah ujung timur. Dalam proses pengintegrasian Timor Timur ke wilayah Indonesia diwarnai dengan sederet peristiwa yang cukup signifikan. Bahkan didalam peristiwa tersebut sering kali menimbulkan beberapa kontroversi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu salah satunya mengenai deklarasi Balibo. Menurut buku pembelajaran SMA yang sering beredar deklarasi tersebut dilaksanakan di daerah Balibo Timor Timur tetapi Historiografi lain menyebutkan terdapat kebohongan dari narasi sejarah tersebut dimana deklarasi tersebut sebenarnya digelar di daerah Bali Indonesia. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai kebohongan tersebut karena pemerintah Indonesia berusaha untuk menutup nutupi fakta yang sebenarnya terjadi yang mengiringi proses integrasi Timor Timur ke wilayah NKRI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Sujatmoko, *Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Avelio M. Coelho, *Dua Kali Merdeka, Esai Sejarah Politik Timor Leste*. Yogyakarta: Djaman Baroe. 2012
- B.J Habibie, *Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri. 2006
- Domingos M. Soares. *Timor Timur Kasus Paling Memalukan PBB*. Jakarta: Setiahati Press. 2002
- Dr Asvi Warman Adam, *dalam sebuah makalah berjudul "Sejarah Timor-Timur dalam Sejarah Indonesia" disampaikan dalam Audensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004*.
- E.M. Tomodok, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1994
- F.X Lopez Cruz, *Kesaksian Aku dan Timor Timur*. Jakarta: Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae. 1999
- Helen Marry Hill, *FRETILIN, Gerakan Nasional Pembebasan Timor Lorosae*. Dili: Yayasan HAK. 2000
- Helen Van Klinken, *Anak-Anak Tim-Tim di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2014
- Hendracaroko Marpaung, *Timor Timur Menyerang Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press. 2009